



MODUL

Kode Mata Kuliah	: M P B
Bobot S K S	: 3 SKS
Dosen Pengampu	: Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si
Nama Mata kuliah	: Pengantar Ilmu Politik
Topik/Pokok Bahasan	: Negara dan Partai Politik
Pokok-Pokok Perkuliahan	:
	<input type="checkbox"/> Pengertian Negara
	<input type="checkbox"/> Sifat Negara
	<input type="checkbox"/> Tugas Negara
	<input type="checkbox"/> Unsur-Unsur Negara
	<input type="checkbox"/> Tujuan Negara
	<input type="checkbox"/> Fungsi Negara
	<input type="checkbox"/> Pengertian Partai Politik
	<input type="checkbox"/> Sejarah Partai Politik
	<input type="checkbox"/> Fungsi Partai Politik
	<input type="checkbox"/> Tipologi Partai Politik
	<input type="checkbox"/> Ciri-Ciri Partai Politik
	<input type="checkbox"/> Sistem Kepartaian
	<input type="checkbox"/> Partai Politik di Indonesia

A) NEGARA

Adalah Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan-peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

a.1 Pengertian Negara

ROGER H. SALTU : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

HAROLD D. LASKI : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

❖ Kaum Filsuf

- Aristoteles (Yunani) : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
- Cicero (Roma) : Negara adalah timbulnya pemikiran sehat masyarakat banyak bersatu untuk keadilan, dan berpartisipasi bersama dalam keuntungan.
- Francis Jean Bodin : Negara adalah asosiasi beberapa keluarga dengan kesejahteraan yang layak, dengan alasan yang sehat setuju untuk dipimpin oleh penguasa tertinggi.

ACHTUNG

- 1) Tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri.; 2) Tidak ada kesempurnaan/keuntungan hidup secara mutlak terdapat dalam Negara; 3) Tidaklah mungkin semua masyarakat di dalam negara bisa menyantuni kesejahteraan rakyatnya.

❖ Kaum Modernis

- Phillimore : Negara adalah orang- orang yang secara permanent mendiami suatu wilayah tertentu, dijilid dengan hukum- hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat- istiadat didalam satu kebijaksanaan.
- Bluntschli : Negara adalah organisasi kebijaksanaan orang- orang diwilayah tertentu.
- Gettell : Negara adalah komunitas oknum-oknum, secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan.

a.2 Sifat Negara

- Memaksa Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.
- Monopoli Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
- Mencakup Semua Semua aturan atau perundang-undangan berlaku untuk setiap warga negara tanpa terkecuali.

a.3 Tugas Negara

- Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang a-sosial. Yakni, yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
- Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

a.4 Unsur-Unsur Negara

- Wilayah
- Penduduk
- Pemerintah
- Kedaulatan

a.5 Tujuan Negara

BONUM PUBLICUM, COMMON GOOD, COMMON WEAL *“Asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama – menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya – ”*

ROGER H. SOLTAU : Tujuan negara memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin.

HAROLD D. LASKI : Menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat tercapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

TUJUAN NEGARA RI : “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

(Undang – Undang Dasar 1945)

a.6 Fungsi Negara

- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
- Melaksanakan penertiban
- Menegakkan keadilan
- Pertahanan

B) PARTAI POLITIK

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk **MERAIH KEKUASAAN**. Selain memiliki tujuan yang jelas, adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Di samping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu partai politik perlu kita pelajari. Pada materi kali ini akan membahas tentang partai politik, namun yang akan dibahas bukan mengenai strategi partai politik untuk memperoleh kekuasaan, melainkan lebih bersifat pengantar untuk mengenal lebih dekat apa dan bagaimana partai politik itu.

b.1 Pengertian Partai Politik

Partai berasal dari bahasa latin yaitu **PARTIRE** yang bermakna membagi. Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi, dimana faksi di Eropa pada masa lalu sekitar abad XVIII memiliki konotasi negatif dan sangat dikenal sebagai organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik. Faksi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni **facere** yang artinya bertindak atau berbuat, dalam pengertian politik, faksi adalah *kelompok yang melakukan tindakan-tindakan merusak, kejam dan bengis*. Pembicaraan tentang faksi biasanya mengarah pada pembicaraan kelompok dimana kepentingan bersama harus tunduk pada kepentingan perorangan (Cipto :1998:1).

Sementara partai politik per definisi, merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa. Secara harfiah, partai politik memiliki pengertian sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, atau cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik. Pengertian Partai Politik Menurut Ahli

ROGER F SALTOU : "Partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

SIGMUND NEUMANN : "Sebagai organisasi artikualitif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

CARL. J. FRIEDRICH : "Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemamfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

MARIAM BUDIARJO : "Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita yang sama . Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) secara konstitusional –untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

UU NO. 2 TAHUN 2008 : "Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum".

Dari beberapa pendapat dapat menarik unsur-unsur suatu organisasi yang dapat di katagorikan sebagai partai politik yakni :

- Kumpulan dari orang-orang yang teroganisir;
- Orang-orang tersebut bergabung secara suka rela dan diikat oleh suatu nilai-nilai tertentu;
- Organisasi tersebut bertujuan untuk merebut,menempatkan anggotanya dan mempertahankan suatu jabatan politik;
- Dalam merebut jabatan politik itu biasanya dilakukan secara konstitusionil;
- Organisasi tersebut memperjuangkan kepentingan anggotanya baik kepentingan yang bersipat idiil maupun materil.

b.2 Sejarah Partai Politik

Kelahiran partai politik tidaklah terlepas dari sejarah perkembangan ketatanegaraan di Inggris, Gloria revolusi setidak-tidaknya merupakan faktor awal yang mendorong kelahiran partai politik. Gloria revolusi melahirkan parlemen pertama di dunia modern, yakni dengan lahirnya House of Lord, sebagai tuntutan para bangsawan. Lembaga ini pada mulanya hanya sebagai badan penasehat raja yang anggota terdiri dari bangsawan. Dalam perkembangannya kemudian House of Lord menjadi semakin kuat dan akhirnya merupakan lembaga pertama yang mengontrol kekuasaan raja. Perkembangan selanjutnya dari revolusi itu adalah terbentuknya House of Common. Dinamakan House of Common karena keanggotaanya terdiri dari orang kebanyakan dalam pengertian bukan para bangsawan. Lahirnya lembaga ini, sebenarnya berkaitan dengan tuntutan rakyat yang terkena pajak, karena dalam penetapan pajak kaum bangsawan tidak dikenakan kewajiban untuk itu. Dengan adanya lembaga ini, rakyat yang terkena pajak menuntut agar mereka dilibatkan dalam menentukan perpajakan.

Dalam perkembangannya selanjutnya, untuk mengisi keanggotaan House of Common dilakukan **PEMILIHAN**. Untuk memenangkan pemilihan, kelompok elit dalam masyarakat dan dalam perlemen kemudian membentuk panitya-panitya untuk mencari pendukung untuk tokohnya. Bagi mereka yang merasa sepaham dengan pandangan politik dari tokoh yang akan didukungnya kemudian membentuk masa tersendiri. Disinilah panitya dan kelompok pendukungnya inilah

sebagai cikal bakal kelahiran partai politik. Dalam perkembangannya kemudian kehadiran partai politik tidaklah dapat diterima secara serta merta terutama dalam abad 18, tetapi diterima secara gradual melalui proses panjang. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Eropa saat itu, dimana partai masih dipahami sebagai faksi yang pada masa itu mempunyai konotasi yang negatif yakni sebagai organisasi penghasut.

Huntington (Cipto: 1998:2) mengkategorikan pertumbuhan dan perkembangan partai ke dalam empat tahap yakni :

1. FAKSIONALISASI -- Masyarakat baru mengenal partai suatu invensi kultural baru di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada saat bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutan keadaan, politik ditandai dengan persaingan sengit antar kelompok atau faksi yang berusaha memerebutkan kekuasaan dan pengaruh, masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri organisasi politik modern, yakni, organisasi profesional dan basis sosial pendukung organisasi politik tersebut.
2. POLARISASI -- Dalam tahap ini partai tampak berusaha menerobos dinding-dinding sosial tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Proses tinggal landas ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai. Meningkatnya kesadaran politik warganegara dengan sendirinya memperluas ruanglingkup partisipasi politik. Momen penting ini segera diikuti dengan meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat majemuk dan kompleks. Heterogenitas masyarakat modern di tengah perubahan sosial ekonomi secara perlahan-lahan menumbuhkan polarisasi kelompok sebagai akibat dari makin kompleksnya masyarakat politik.
3. EKSPANSI ATAU PERLUASAN -- Pada tahap ini partai telah berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Dalam persaingan antar partai dukungan massa yang luas dan beragam serta berlapis merupakan syarat pokok untuk membangun kekuatan

partai, partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum.

4. PELEMBAGAAN -- Adalah tahap akhir dari pertumbuhan partai politik, dimana partai relatif telah mencapai tahap mapan, dengan ditandai terbentuknya sistem dua partai, sistem multipartai atau sistem partai tunggal dominan. Sistem partai yang telah terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Pergantian lebih banyak terjadi pada aspek peralihan pemerintahan oleh partai atau koalisi partai lain.

b.3 Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut pemilihan umum. Partai politik juga melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Mariam Budiarjo dalam buku "Pengantar Ilmu Politik" mengidentifikasi ada beberapa macam fungsi dari partai politik, di antaranya :

1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi ini, Partai politik menghimpun berbagai masukan, ide dari berbagai lapisan masyarakat. Aspirasi ini kemudian digabungkan. Proses penggabungan ini sering disebut sebagai "penggabungan kepentingan" (interest aggregation). Setelah berbagai gagasan, ide, kepentingan tersebut digabungkan, selanjutnya berbagai kepentingan tersebut disusun dan dirumuskan secara sistematis dan teratur, proses ini sering disebut dengan perumusan kepentingan (articulation of interest). Rumusan tersebut kemudian dijadikan program partai yang akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan suatu kebijakan umum. Selain komunikasi yang demikian, partai politik juga berperan sebagai wadah untuk menyebarkan kebijakan pemerintah dan mendiskusikannya. Dengan demikian terjadi dialog baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Peran yang demikian, menempatkan partai politik sebagai perantara atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam suatu ide-ide atau gagasan-gagasan.

2. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kecil hingga ia dewasa. Di samping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan pemilu, partai memerlukan dukungan massa. Untuk itu partai menciptakan "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warganegara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Di negara-negara baru, partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integritas nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader dan lainnya.

3 Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk didik menjadi kader partai.

4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah hal wajar, jika terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasinya. Adapun fungsi partai politik secara normatif dirumuskan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1999 sebagai berikut :

- Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijaksanaan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan / perwakilan rakyat;
- Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

b.4 Ciri-Ciri Partai Politik

- Berakar dalam masyarakat lokal
- Melakukan kegiatan terus menerus
- Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan
- Ikut serta dalam pemilihan umum.

b.5 Tipologi Partai Politik

Partai politik dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu di antaranya, asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkan Asas dan Orientasi partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu partai politik pragmatis, yaitu partai politik yang tidak terikat kaku dengan ideologi dan doktrin tertentu, partai politik doktriner, yaitu partai politik yang memiliki program konkret yang merupakan penjabaran dari ideologi tertentu, dan partai politik kepentingan yaitu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu. Mariam Budiarto dalam buku yang sama menyatakan klasifikasi partai dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.

Partai Massa

Mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai

dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

□ Partai Kader

Mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan. Klasifikasi lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasi, dalam hal mana partai-partai dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai perlindungan (patronage party) dan partai ideologi atau partai azas (Weltanschauungs Partai atau Programmatic Party).

□ Partai Lindungan

Umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya; karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari partai semacam ini.

□ Partai Ideologi/Partai Azas

Biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.

b.6 Sistem Kepartaian

Dalam literatur dikenal beberapa sistem kepartaian yang berlaku di berbagai negara yakni sistem nonpartisan, sistem partai tunggal, sistem partai

dominan, sistem dwi partai, dan sistem multi partai. Namun, tidak semua negara sepakat dalam menggunakan sistem itu. Beberapa negara yang menjalankan sistem multi partai tetapi kenyataannya hanya satu partai yang dominan seperti Singapore dengan PAP-nya atau seperti Indonesia di masa Orde Baru dengan Golkar. Negara-negara lain (yang juga multi partai-red) seperti Amerika Serikat, dalam kenyataannya menggunakan two dominant-party system dengan Partai Republik dan Demokrat. Hal yang sama terjadi di Inggris dengan Partai Buruh dan Konservatif.

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai dan sistem multi partai.

- Sistem Partai Tunggal -- Sistem partai ini biasanya berlaku di dalam negara-negara Komunis seperti Cina dan Uni Soviet
- Sistem Dua Partai -- Sistem partai seperti ini dianut sebagian negara yang menggunakan paham liberal pemilihan di negara-negara tersebut menggunakan sistem distrik. Negara yang menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dan Inggris.
- Sistem Multipartai -- Sistem partai seperti ini dianut oleh negara Belanda, Perancis, di dalam sistem ini menganut partai mayoritas dan minoritas dan diikuti oleh lebih dari dua partai.

b.7 Partai Politik di Indonesia

Indonesia menganut sistem kepartaian dengan sistem multi partai, sejak reformasi 1998 Indonesia menganut sistem multi partai. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan partai politik di Indonesia adalah melakukan penaksiran (assessment) terhadap tingkat pelebagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik. Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan

kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Dengan mudanya usia partai politik di Indonesia terlebih partai politik yang berdiri sesudah reformasi 1998, menurut Ramlan Surbakti, Partai politik di Indonesia setidaknya-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama. Namun, menurut Ramlan Surbakti, partai-partai politik di Indonesia setidaknya-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama, yaitu :

- Ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain;
- Secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota;
- Secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. (Ramlan Surbakti, Perkembangan Parpol di Indonesia).

Ke depan wacana partai politik yang mengemuka adalah penyederhanaan partai politik di pemilu 2009, bahwa jumlah partai politik terlalu banyak, akibatnya pelaksanaan pemerintahan rumit. Terlalu banyak kepentingan yang harus dinegosiasikan antara DPR dan pemerintah. Karena itu muncul gagasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian menjadi sistem multipartai yang lebih sederhana.

❖ Perjalanan Parpol di Indonesia

- Pra - 945

Yakni suatu masa yang ditandai dengan kebangkitan kesadaran nasional dalam rezim kolonial 1939. Pada masa ini terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad, di antaranya :

1. Fraksi Nasional (Husni Thamrin)
2. Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera (Prawoto)
3. Indonesische Nationale Groep (M. Yamin)

Sementara di luar Volksraad, antara lain :

1. KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia/Nasionalis)
2. MIAI (Majelis Islamil A'laa Indonesia/Islam)
3. MRI (Majelis Rakyat Indonesia).

Sedangkan pada jaman pendudukan Jepang, keberadaan partai politik dilarang keras, kecuali pembentukan Partai Islam (Masyumi)

- Pasca - 1945

Ditandai dengan Proklamasi sebagai gerbang awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada era merdeka itu pemerintah membuka seluas-luasnya bagi rakyat untuk mendirikan partai politik.

1. Pemilu 1955
2. Kemenangan 4 partai besar PKI, NU, Masyumi, PNI.
3. Demokrasi Terpimpin
4. Dipersempit ruang geraknya.
5. Orde Baru 1971
6. Golkar menjadi pemenang, diikuti NU, Parmusi, dan PNI.
7. Pemilu 1977
8. Dua Parpol dan Golkar (setelah pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar) UU Parpol No. 3 Tahun 1985

- Parpol dan Pemilu 2009

Jumlah partai politik peserta pemilu bertambah lagi pada Pemilu 2009 mendatang yakni 34 parpol. Sebelumnya hanya 24 di Pemilu 2004, turun dari 48 parpol pada Pemilu 1999. Naiknya parpol peserta pemilu untuk Pemilu 2009 paling tidak disumbang oleh beberapa sebab, di antaranya :

- a. Pertama, parpol lama yang mendapat kursi di DPR (meskipun hanya satu kursi) otomatis lolos akibat aturan peralihan dalam UU No.10/2008 yang membatat ketentuan Electoral Treshold (ET) sebagaimana diatur pada UU No.12/2003.
- b. Kedua, lolosnya parpol baru setelah hasil verifikasi KPU.

Mendirikan parpol merupakan hak yang mesti dijamin. Tetapi untuk ikut serta dalam pemilu seharusnya hanya parpol yang mendapat dukungan memadai saja

yang bisa. Jika semua parpol bisa ikut tanpa pembatasan, betapa mahal dan rumitnya proses pemilu. Konsistensi merupakan hal penting.

SUMBER REFERENSI

1. Andrews, CM. & Mas'ood, M. 2008. **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
2. Cholisin. 2001. **Dasar-dasar Ilmu Politik**. Yogyakarta : FIS UNY
3. Frans Magnis Suseno. 1986. **Kuasa dan Moral**. Jakarta : PT. Gramedia
4. Isjwara. 1982. **Pengantar Ilmu Politik**. Bandung : Bina Cipta
5. May Rudy. 2003. **Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya**. Bandung : Refika Aditama.
6. Miriam Budiardjo, Miriam. 2005. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Gramedia: Jakarta.
7. Ramlan S. 1992. **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.